Sekali Lagi soal Peraturan Antikriminalisasi Pejabat

Belakangan ini, kriminalisasi menjadi salah satu kata paling populer yang diucapkan dan dipakai di berbagai pemberitaan media massa. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kriminalisasi diartikan sebagai proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.

Kata ini belakangan lekat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa kasus hukum yang menyasar sosok-sosok penting di lembaga antikorupsi itu dipersepsikan sebagai tindakan kriminalisasi.

Dari KBBI, bisa diartikan bahwa dalam kriminalisasi ada perubahan persepsi, dari suatu tindakan yang sebelumnya bukan pelanggaran hukum, berubah arti menjadi tindakan yang melanggar. Kriminalisasi dari logika sosiologi hukum pidana bersyaratkan ada perubahan perundangan atau norma hukum, dari semula tak berimplikasi sanksi menjadi sebaliknya. Kata ini juga bersilogisme dengan penjara atau bui sebagai sanksi.

Kata lain yang juga tak kalah *ngetren* adalah anggaran. Di KBBI disebutkan, Anggaran adalah 1) perkiraan; perhitungan; 2) aturan; 3) *Ek* taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Kondangnya, kata ini dikaitkan dengan pembangunan dan program pemerintah yang belakangan terkendala.

Dalam berbagai pemberitaan media massa, disebut bahwa penyerapan anggaran yang menjadi pintu masuk jalannya proyek pembangunan sangat minim di daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memaparkan per 30 Juni 2015, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi rata-rata 25,9 persen. Sementara itu, realisasi belanja APBD kabupaten/kota sebanyak 24,6 persen. Di Ibu Kota, penyerapan anggaran DKI Jakarta baru 19,4 persen.

Kriminalisasi alias persoalan hukum yang dicari-cari ternyata juga terkait penyerapan anggaran yang minim di daerah. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menilai, keduanya berkaitan.

Menurut Sofyan Djalil, banyak kepala daerah ketakutan menggunakan APBD karena takut dikriminalisasi. Alih-alih menggunakan anggaran bagi kemaslahatan warga dan pembangunan, kepala daerah bisa malah diganjar hukuman, bukan memperoleh prestasi.

Karena itu, harus dicarikan jalan agar kepala daerah sebagai kuasa pengguna anggaran tak merasa ketakutan. Inilah yang mendasari niatan perlunya Peraturan Presiden (Perpres) Antikriminalisasi Pejabat Negara. Pro kontra mengikuti diskursus ini. Banyak pihak, termasuk KPK menilai, kebijakan itu tak perlu. Isu ini pun hilang ditelan banyaknya persoalan lain.

Kini, Wapres Jusuf Kalla kembali mengingatkan, peraturan itu tetap menjadi agenda pemerintah. Ia pun mengingatkan pihak lain, termasuk KPK, agar tak perlu kontra dengan peraturan baru itu nantinya.

"Kalau pemerintah membuat itu, tidak ada yang boleh menolak. Bagaimana caranya? Apa urusannya KPK menolak perpres yang dikeluarkan pemerintah?" ucap wapres di Jakarta, Selasa (7/7).

Wajar Jusuf Kalla dan Sofyan Djalil berkeras akan perlunya optimalisasi penyerapan anggaran segera. Pembangunan infrastruktur adalah target pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ini termaktub jelas dalam Nawacita, program kerja yang diusung keduanya saat berkampanye.

Pembangunan haruslah berjalan. Ia gusar karena banyak kepala daerah mengeluhkan dipanggil jaksa dan polisi terkait dugaan pelanggaran penggunaan anggaran.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi, juga mendesak agar dana Rp 255 triliun dari pemerintah pusat yang masih terhenti di bank-bank pembangunan daerah harus dikucurkan bagi pembangunan, bukan cuma disimpan. Di sisi lain, politik anggaran di Tanah Air selama ini yang kerap bersentuhan dengan korupsi tak terbantahkan. Data di KPK dan ICW, juga di Kemendagri mencatat, lebih 300 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Dana yang digunakan kebanyakan APBD. Singkatnya, anggaran menjadi hal yang rawan diselewengkan.

Hendri Saparini, ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sebelumnya memimpin ECONIT menilai, ada sisi lain penyebab rendahnya penyerapan anggaran, sebagaimana koran ini beritakan kemarin. Salah satu faktor nya karena banyak kepala daerah petahana yang menunda membelanjakan APBD. Ia mensinyalir, ini ada kaitannya dengan motif-motif politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015.

Pengucuran bantuan ke warga menjelang pilkada bukan hal aneh selama ini. Petahana menjadikannya "alat" *sweetener* bagi pemilih potensial.

Jika ini benar menjadi salah satu penyebabnya, berarti ketakutan terhadap kriminalisasi bisa jadi hanya alasan rendahnya penyerapan anggaran. Sisi lain dari pilkada serentak bisa mendasari kurang jalannya pembangunan.

Begitu pun halnya dengan kegusaran akan langkah penegak hukum, seperti polisi dan jaksa yang kerap memeriksa kepala daerah terkait dugaan penyelewengan anggaran. Sebagaimana disebutkan Wapres Jusuf Kalla, ini haruslah dijawab dengan langkah komprehensif. Penegasan koordinasi dan validasi indikasi penyelewengan dari auditor, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), harusnya menjadi syarat utama pemanggilan oleh aparat hukum.

Menjadikan ketakutan akan dikriminalisasi sebagai dasar keluarnya peraturan yang melindungi penyelenggara negara di daerah untuk memakai anggaran sepertinya bukan solusi utama. Ada hal lain yang harus diselisik seperti di atas. Kebijakan negara semestinya berdasarkan perimeter valid dan empiris, bukan hanya dari masukan segelintir pihak. ●

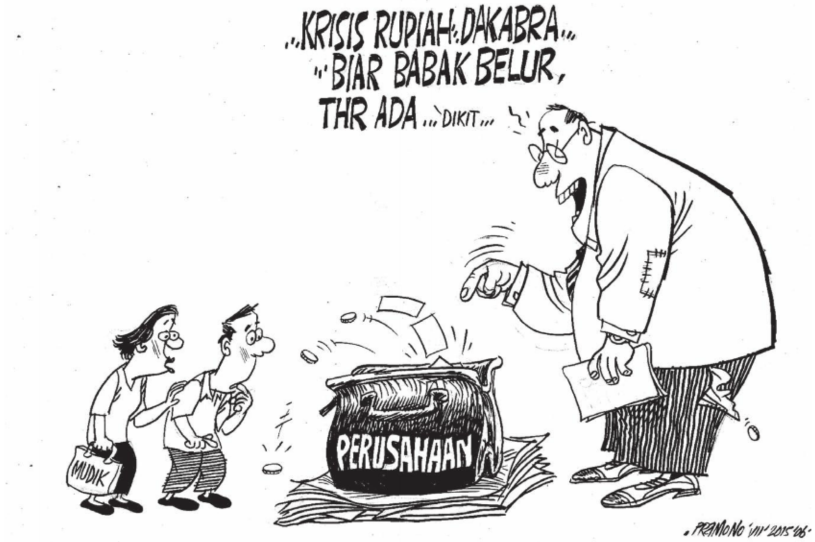

Perkembangan Rasionalitas Mudik

Riza Multazam Luthfy

Dalam beberapa hari ke depan, para perantau di kota besar beramai-ramai mudik ke kampung halaman. Mereka rela menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan, asalkan keinginan berkumpul dengan keluarga dan handai tolan bisa terwujud. Lalu lintas yang macet dan jalan raya yang berlubang mereka lalui demi merengkuh kedamaian, ketenteraman, dan keguyuban saat merayakan hari kemenangan.

Saat ini, mudik lebih identik dengan pulang kampung. Padahal dulu kala, mudik bermakna pergi ke udik atau berlayar ke hulu sungai. Hal ini menandakan; berjalannya waktu, unsur sosial, politik, dan budaya turut memberikan dampak terhadap "nasib" kata tersebut.

Sejumlah kamus, baik *Kamus Indonesia Ketjil* (E St Harahap, 1943), *Maleis Woordenboek* (Van Ronkel, 1946), maupun *Logat Ketjil Bahasa Indonesia* (Poerwadarminta, 1948) memaknai mudik sebagai "berlayar atau pergi ke udik (ke hulu sungai)". Sementara itu, *Ensiklopedi Indonesia* (Mulia dan Hidding, 1957)

tidak memuat entri mudik. Ini berlatar belakang karena pada waktu diterbitkannya ensiklopedia tersebut, mudik tak dianggap penting sebab belum merepresentasikan fenomena sosial.

Dengan demikian, sebelum tahun 1970-an, kata mudik belum dimaknai sebagai pulang ke kampung halaman. Ketika itu, mudik tidak pernah dikaitkan dengan Lebaran sebab dua peristiwa tersebut tidak berhubungan. Orang-orang mulai menghubungkan keduanya setelah istilah mudik mengalami perkembangan.

Adalah Poerwadarminta (1976), yang menyelipkan mudik dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* dengan arti "pulang ke desa atau ke dusun". Leksikograf yang kerap memakai nama samaran Ajirabas, Semplak, atau Sabarija tersebut menerapkan mudik dalam contoh kalimat, "Tiga hari sebelum Lebaran, sudah banyak orang yang mudik."

Ini berarti baru pada tahun 1976, istilah mudik yang berasal dari bahasa Betawi tersebut lekat dengan kebiasaan pulang kampung menjelang Lebaran. Tak heran kamus-kamus lain yang terbit sesudah 1976 memuat entri mudik dalam dua makna, yaitu (berlayar pergi, pergi) ke udik (hulu sungai, pedalaman) dan pulang ke kampung halaman (Andi Andrianto, 2013).

Pada mulanya, tradisi mudik di negeri ini didasari gelombang urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota secara besar-besaran tidak lantas membuat masyarakat urban lupa dengan tanah kelahiran. Para perantau meningkatkan taraf perekonomian mereka sambil beradaptasi dengan lingkungan baru.

Akhinya, mereka terpaksa memakai topeng demi menyembunyikan identitas dan menyamarkan jati diri. Mereka menunjukkan cara berpikir materialistis-hedonistis dengan menjunjung tinggi pola hidup kompromistis-permisif, yang lebih mewakili budaya kontinental/daratan ketimbang budaya maritim/kelautan. Namun demikian, di balik mode pengkhianatan terhadap diri sendiri, alam bawah sadar mereka sebenarnya masih terpaut dengan nilai, prinsip, dan sejarah kampung.

Oleh dasar itulah, selain peneguhan identitas kultural dan politik, mudik dipilih sebagai ikhtiar membangkitkan kembali nilai-nilai yang melekat di alam bawah sadar tersebut.

Tradisi mudik yang turun-temurun dapat dilihat dari aspek perkembangan rasionalitas masyarakat. Era 1970-an hingga 1990-an menjadi penanda bahwa mudik mempunyai motif tradisional.

Pada waktu itu, tingkat rasionalisasi di negeri ini relatif belum berkembang secara pesat. Para perantau mengokohkan kembali semangat pola kehidupan tradisional yang terkikis arus modernisasi di kota-kota besar. Dengan mudik, mereka ingin menegaskan diri sebagai anggota komunal daerah asal, sebuah lanskap saat hubungan sosial tak dihargai dengan pamrih.

Lebih Rasional

Dewasa ini, motif mudik telah bergeser ke arah yang lebih rasional. Pada umumnya, mudik didorong alasan praktis-pragmatis. Bagi masyarakat urban, mudik lebih dari sekadar tradisi. Mudik dianggap nostalgia, obsesi, bahkan ilusi.

Faktor mudik kerap didasari kehendak memungut kembali kenangan di desa atau dusun yang selalu menumbuhkan romantisme. Karena itu, bagi perantau, mudik ibarat cermin yang memantulkan bayangan masa silam. Ragam peristiwa dan suasana yang dilalui senantiasa mengalirkan sensasi dan *déjà vu* yang menggelora. Sebagai salah satu bentuk katarsis, mudik dipercaya dapat menghapus berbagai emosi negatif.

Dengan kembali ke tanah kelahiran, pemudik dapat melepaskan segala macam beban, penat, dan tekanan yang menghantui hidup. Fakta bahwa mereka yang bekerja di kota besar selalu menghadapi beragam permasalahan perlu disegarkan dengan wisata kekeluargaan.

Mudik juga menjadi media aktualisasi diri. Bagi pemudik, perjuangan di tanah rantau yang digenapi cerita manis dalam karier dan pekerjaan perlu diekspresikan kepada saudara di desa atau dusun. Di samping memuaskan pemudik, ekspresi semacam ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga.

Perkembangan rasionalitas masyarakat menjadikan mudik sebagai fenomena campuran. Dalam pandangan Mohamad Sobary (2013), di samping fenomena kebudayaan di kalangan kaum migran yang setia merawat tradisi, mudik merupakan fenomena keagamaan dengan atribut rohani yang mereka butuhkan.

Tampaknya, makna mudik sebagai pulang kampung tak akan tergantikan. Nilai-nilai religiusitas telah memantapkan fondasi tradisi mudik yang dikaitkan dengan Lebaran.

Sesuai pandangan JJ Rousseau, sebuah tradisi yang ditopang ajaran agama dapat senantiasa mengakar kuat dalam sanubari masyarakat.

Penulis adalah dosen STAI Attanwir Bojonegoro, Jawa Timur.

Kontak **pembaca**

Pengirim harus menyertakan bukti identitas yang sah dan berlaku ke **kontakpembaca@sinarharapan.co.id**

Fasilitas Penerbangan yang Buruk

Redaksi Yth,

Penerbangan Indonesia saat ini bisa dibilang buruk. Hal ini sangat memprihatinkan karena sering terjadi kecelakaan pesawat udara dan lain hal.

Banyak hal yang harus diperbaiki, seperti sistem manajemen transportasi nasional. Jangan hanya ingin mendapatkan keuntungan yang besar, lalu mudah mengabaikan keselamatan penumpang.

Keselamatan harus diutamakan melebihi apa pun. Masih banyak pula yang menjadi kelemahan yang pada akhirnya menjadi batu sandungan bagi terjaminnya keselamatan penerbangan kita.

Kondisi bandara juga harus diperhatikan. Perlu peremajaan atau perawatan bandara. Tidak hanya pesawat, bandara juga harus memenuhi fasilitas yang menunjang standar keselamatan.

Contoh kondisi bandara yang tidak baik dapat dilihat dari insiden yang terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, baru-baru ini. Peristiwa tersebut seolah meninju wajah dunia penerbangan kita yang tak mau berbenah dari masalah-masalah yang pernah dihadapi sebelumnya.

Fasilitas penunjang, baik dari segi pesawat maupun bandaranya, seharusnya lebih diperhatikan. Ini agar insiden kecelakaan berkurang.

Keprihatinan ini sebenarnya muncul dari pengertian dan persepsi tentang *aerodrome* atau bandara ditambah fasilitas penerbangan, yang jangan-jangan hanya diartikan dengan pengertian sebatas bandara atau terminal. Padahal jika dilihat lebih jauh, hal ini bisa terjadi karena para pengelola yang bertanggung jawab terhadap fasilitas-fasilitas penerbangan ini konon dipimpin orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang pengetahuan dan karier di bidang penerbangan.

Rian Rudianto
Jatiasih, Bekasi

SINAR HARAPAN

TERBIT PERTAMA 27 APRIL 1961

WARTAWAN SINAR HARAPAN DILARANG MENERIMA/MEMINTA APAPUN DAN DARI SIAPAPUN YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA

ALAMAT REDAKSI/IKLAN/SIRKULASI: Jl Raden Saleh No 1B–1D Cikini, Jakarta Pusat 10430 **TELEPON:** (021) 3913880, (Hunting) Fax: (021) 315-3581 **E-MAIL:** redaksi@sinarharapan.co.id, iklan@sinarharapan.co.id, info@sinarharapan.co.id **PENERBIT:** PT Sinar Harapan Persada **REKENING IKLAN:** Bank Mandiri, a/c 1170001036680 **REKENING SIRKULASI:** Bank Mandiri, a/c 1170001036672 **PEMIMPIN UMUM:** Daud Sinjal **WAKIL PEMIMPIN UMUM:** Banjar Chaeruddin **PEJABAT PEMIMPIN REDAKSI:** Rikando Somba **REDAKTUR PELAKSANA:** Sri Wahyu Dramastuti, Naomi Siagian **REDAKTUR SENIOR:** Aristides Katoppo, Daud Sinjal, Pramono R Pramoedjo, Banjar Chaeruddin, Krisman Kaban, Fransisca Ria Susanti, Norman Meoko, **DEWAN REDAKSI:** Daud Sinjal (Ketua), Aristides Katoppo, Bacelius Ruru, Kristanto Hartadi, Prof DR Yohanes Surya, Prof DR Bungaran Saragih, DR Wagiono Sunarto, DR Jatna Supriatna, Nico Sompotan, Riantiarno, Poppy Dharsono, Yanti Sugarda, Valentina Sagala, Pramono R Pramoedjo, Bachtiar Sitanggang, HBL Mantiri, Panda Nababan, Jopie Lasut, Marzuki Usman, Jeffrie Geovanie **REDAKTUR:** Ida Rosdalina, Inosensius Jemabut, Satoto Budi, Sihar Ramses Simatupang, Ray Soemantoro, Effatha Tamburian, Moh Ridwan, Rafael Sebayang, Albertina Suzana Calemens, Don Peter **ASISTEN REDAKTUR:** Ellenor Ribekah Piri, Jonder Sihotang, Diamanty Meiliana, Septiawan, Rialini Rering E M N, Stevani Elisabeth, Danang J Murdono, Tutut Herlina, **STAF REDAKSI:** Edy Wahyudi, Dany Putra, Faisal Rachman, Gatot Irawan, Hans Arthur, Heru Guntoro, Imelda Valentina Rajagukguk, Job Paul Palar, Jessica Rezamonda, Jenda Ras Yuana Munte, Jessica A Debora, M Bachtiar Nur, Muniroh, Ninuk Cucu Suwanti, Nofanolo Zagoto, Ruhut Ambarita, Saiful Rizal, Sigit Wibowo, Sulung Prasetyo Surono, Septiawan, Toar Sandy Purukan, Vidi Vici P Batlolone, Wheny Hari Muljati, Widita Fembrian, Sheima Aisya **PENYUNTING BAHASA:** Rahmat Herry Prasetyo (koord), Erha Aprili Ramadhoni, Sekar Arum Purwaningsih, Teodora Nirmala Fau **KARIKATURIS:** Pramono R Pramoedjo **ILUSTRATOR:** Lukas Setiadi **KONTEN DAN PENGOLAHAN DATA:** Henri Loedji (Koord), Raditya Nugraha, Laksono Pambudi **DAERAH:** Saufat Endrawan, (Bandung), Aju (Pontianak), Deden Yamara (Pekanbaru), Eka Susanti (Malang), Iman Nur Rosyadi (Banten), Muh Nasir (Palembang), Periksa Ginting (Bogor), Novie Waladow (Manado), Odeodata H Julia (Papua), Sri Rahayu Ningsih (Jambi), SU Herdjoko (Semarang), Yuyuk Sugarman (Yogyakarta), Erna Dwi Lidiawati (Palu), Syafnijal Datuk Sinaro (Lampung), Agus Sana'a (Kendari), Dis Amalo (Kupang), Robino S Hutapea (Depok) **KONTRIBUTOR LUAR NEGERI:** Yuyu AN Krisna Mandagie (Eropa), Josi Katoppo (Amerika), Irene Kwik (Kanada), Retnowati Abdulgani Knapp (Vietnam) **SEKRETARIS REDAKSI:** Dame Sitompul (Koord), Royner H Hoke, Meiny Angelina Worek, Isvaldo **PERWAJAHAN:** Heri Suroso (Koord), Samuel AJ Toelle, Rahmatulloh, Endang Hadiwijaya, Desman, Muhamad Diar, Refky Anria Lacanda, Bobby Saputra **IT/ Information Tecnology:** Dimitri Tobias Lessy (Koord), Eddy Setyawan, Gerald H Pelapelapon, Setiyo Budi Eriyanto, Nurali, Bayu **DIREKTUR UTAMA:** Daud Sinjal **WAKIL DIREKTUR UTAMA:** Susanto Sjahir **DIREKTUR:** Prakoso Eko Setyawan Himawan, Chin Mei Fong, Banjar Chaeruddin, Edward Hariandja, Th Sintawati Sukamuljo **PRESIDEN KOMISARIS:** Aristides Katoppo **WAKIL PRESIDEN KOMISARIS:** Jeffrie Geovanie **KOMISARIS:** DR Jatna Supriatna, Mathaeus Rukmasaleh Arif, Karel Patipeilohy, Insa Martha Rorimpandey **MARKETING COMMUNICATION MANAGER:** Leonard Lembong **SUPERVISOR SIRKULASI:** Robby Manaroinsong **MANAGER SISDUR & DIKLAT:** Alberto BC Londa **MANAGER KEUANGAN:** Andi Purnama **SUPERVISOR SDM/UMUM:** Prasetyo **PERCETAKAN:** PT Gramedia *(Isi di luar tanggung jawab percetakan)* **(Anggota SPS No. 293/2001/11/A/2002)**